

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Nonlaba

Menurut perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengaturan yang spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nonlaba. Sedangkan, menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tidak memberikan definisi atau kriteria yang membedakan antara entitas berorientasi laba atau nonlaba, namun entitas dapat melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah entitas termasuk berorientasi nonlaba atau laba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga entitas dapat menerapkan interpretasi ini (ISAK 35, 2019). Berikut ini beberapa interpretasi pertimbangan bagi suatu entitas bisnis, yaitu:

- a. Apakah sumber daya entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba.

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Pertanggungjawaban sebuah entitas dalam bidang keuangan diperlihatkan dalam laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha pada kurun waktu tertentu dan dibuat oleh pimpinan perusahaan sebagai hasil pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang membutuhkannya dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan disusun dan disajikan oleh bagian keuangan secara periode, kemudian dilakukan analisis laporan keuangan dan hasilnya akan merupakan informasi penting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan entitas saat itu.

Menurut Prof. Dr. H. Lili M. Sadeli (2018:8), tujuan umum pelaporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemakainya.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Rugi/ Laba
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

2.3 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2019) memandang perlu untuk menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Hal ini didukung karena telah diterbitkan PPSAK 13 yaitu berisi pernyataan pencabutan pemberlakuan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, maka pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Namun, ISAK 35 tersebut akan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang diterbitkan oleh DSAK pedoman Penyajian Laporan Keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik:

- a. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan
- b. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 (ISAK 35, paragraph 09). Entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh entitas berorientasi nonlaba mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan (*with restrictions*) atau tidak adanya pembatasan (*without restriction*) oleh pemberi sumber daya (ISAK 35, paragraf 10). Menurut Leiwakabessy (2015) Sumber daya dengan pembatasan artinya donatur pemberi sumber daya menentukan lebih spesifik penggunaan aktiva yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, sedangkan tanpa ada pembatasan artinya sumber daya tersebut bebas digunakan namun untuk tujuan umum organisasi.

Entitas berorientasi nonlaba juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, penyesuaian atas penggunaan judul ‘laporan perubahan aset neto’ daripada ‘laporan perubahan ekuitas’. Penyesuaian atas laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang mencerminkan fungsi dan tujuan yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya (ISAK 35, paragraph 10). Entitas berorientasi nonlaba harus mempertimbangkan

seluruh fakta dan keadaan sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (ISAK 35, paragraph 11).

2.4 Bentuk Laporan Keuangan ISAK 35

Interpretasi ini juga dilengkapi dengan contoh ilustratif bentuk penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Contoh ilustratif ini menggunakan judul 'laporan penghasilan komprehensif' untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menggunakan judul lain sepanjang mencerminkan fungsi dan tujuan yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya. Untuk tujuan penyederhanaan, contoh ilustratif ini hanya memberikan penyajian tunggal dalam bentuk satu 'laporan penghasilan komprehensif' untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lainnya. Contoh-contoh dalam interpretasi ini tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk seluruh entitas nonlaba. Contoh ini dapat berbeda dari kondisi yang terdapat dalam entitas berorientasi nonlaba tertentu (ISAK 35, 2019).

2.4.1 Contoh Laporan Posisi Keuangan

Terdapat dua format Laporan Posisi Keuangan, salah satu format dapat dilihat pada tabel 2.1 Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan

komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya atau dengan format B tidak menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Table 2.1 Laporan Posisi Keuangan berdasarkan ISAK 35

ENTITAS XYZ	
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20XX	
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
	20XX
ASET	
<i>Aset Lancar</i>	
Kas dan setara kas	XXX
Piutang bunga	XXX
Investasi jangka pendek	XXX
Aset lancar lain	XXX
Total Aset Lancar	XXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>	
Properti investasi	XXX
Investasi jangka Panjang	XXX
Aset tetap	XXX
Total Aset Tidak Lancar	XXX
TOTAL ASET	xxx
LIABILITAS	
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>	
Pendapatan diterima di muka	XXX
Utang jangka pendek	XXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	
Utang jangka Panjang	XXX
Liabilitas imbalan kerja	XXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXX
Total Liabilitas	xxx
ASET NETO	
<i>Tanpa pembatasan (without restriction) dari pemberi sumber daya</i>	
Surplus akumulasian	XXX
Penghasilan komprehensif lain *)	XXX
<i>Dengan pembatasan (with restriction) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	XXX
Total Aset Neto	xxx
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	xxx

Sumber: ISAK 35

2.4.2 Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif adalah laporan yang terkait laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan dan biaya organisasi selama satu periode anggaran. Laporan Penghasilan Komprehensif yang disajikan dapat dilakukan dengan memilih salah satu format. Ada 2 (dua) format Laporan Penghasilan Komprehensif yang disajikan:

- a. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif (lihat tabel 2.2) atau
- b. Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi neto.

2.4.3 Contoh Laporan Arus Kas

Laporan arus kas terdiri atas 2 (dua) metode yaitu langsung dan tidak langsung. Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk suatu periode (lihat tabel 2.3) dengan metode langsung. Periode yang dimaksud adalah periode sama dengan yang digunakan oleh laporan aktivitas. Penyajian laporan arus kas masuk dan keluar harus digolongkan kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut.

1. Aktivitas Operasi

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional organisasi. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah sebagai berikut.

- a. Surplus atau defisit organisasi (datanya diambil dari laporan aktivitas).
- b. Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap tahun. *Account* (perkiraan buku besar) lain seperti: persediaan, biaya dibayar di muka dan lain-lain.

2) Aktivitas Investasi

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi. Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap, penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain.

3) Aktivitas Pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang organisasi dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus defisit organisasi. Transaksi lain yang mengakibatkan perubahan arus kas masuk dan keluar dalam kelompok ini adalah penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.

dan penghasilan investasi yang dibatasi untuk dan pemeliharaan aktiva tetap.

2.4.4 Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

Catatan atas laporan keuangan dapat berupa:

- 1) Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap organisasi.

Table 2.2 Laporan Penghasilan Komprehensif Berdasarkan ISAK 35

ENTITAS XYZ	
Laporan Penghasilan Komprehensif	
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX	
(dalam Jutaan rupiah)	
	20XX
TANPA PEMBATAS DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
<i>Pendapatan</i>	
Sumbangan	xxx
Jasa layanan	xxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxx
Lain-lain	xxx
Total Pendapatan	xxx
<i>Beban</i>	
Gaji dan upah	(xxx)
Jasa dan profesional	(xxx)
Administratif	(xxx)
Depresiasi	(xxx)
Bunga	(xxx)
Lain-lain	(xxx)
Total Beban (catatan E)	(xxx)
Surplus (Defisit)	xxx
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
<i>Pendapatan</i>	
Sumbangan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxx
Total Pendapatan	xxx
Surplus (Defisit)	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxx

Sumber: ISAK 35

Table 2.3 Laporan Arus Kas Berdasarkan ISAK 35

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX (dalam Jutaan rupiah)	
	20XX
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari sumbangan	xxx
Kas dari pendapatan jasa	xxx
Penerimaan lain-lain	xxx
Bunga yang dibayarkan	(xxx)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian aset tetap	(xxx)
Penerimaan dan penjualan investasi	xxx
Penerimaan hasil investasi	xxx
Pembelian investasi	(xxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN	
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>	xxx
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxx
Investasi bangunan	<u>xxx</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>	
Pembayaran utang jangka Panjang	(xxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	xxx

Sumber: ISAK 35

2.5 Pengakuan Laporan Keuangan

Entitas umumnya menerapkan kriteria pengakuan secara terpisah untuk setiap transaksi. Namun, entitas dapat menerapkan kriteria pengakuan yang berbeda pada tiap komponen yang dapat diidentifikasi dari suatu transaksi tunggal jika hal ini diperlukan untuk merefleksikan substansi dari transaksi. Pengakuan yakni proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi, menyatakan (SAK ETAP, 2016):

- a. Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Ada empat kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui, yaitu:

- a. Relevansi

Informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan.

- b. Definisi

Item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi dalam satu dari tujuh unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.

- c. Realibilitas

Informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral.

d. Dapat diukur

Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan diukur.

Metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi ada dua, yaitu:

1. *Cash basis*

Dalam metode *cash basis*, pendapatan diakui ketika kas diterima, artinya perusahaan mencatat pendapatan ketika kas masuk atau diterima. Pencatatan secara basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata akuntansi *cash basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang diakui untuk mengakui pendapatan.

2. *Accrual basis*

Accrual basis adalah suatu basis akuntansi yang dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Menyediakan informasi yang lebih andal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu entitas mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Teknik *accrual basis* memiliki fitur pencatatan dimana transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.6 Pengukuran Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP (2016) Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

2.7 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Dalam PSAK 1 paragraf 05 mengizinkan entitas berorientasi nonlaba menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat pada laporan keuangan dan menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan atau contoh lebih atas penyesuaian tersebut. ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba memberikan contoh ilustratif laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Dewan Standar Akuntansi

menerima tanggapan bahwa penggunaan kata ‘dapat’ dan ‘sebagai contoh’ pada paragraph DK 10 yaitu “Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”. Hal tersebut memberikan peluang bagi entitas nonlaba untuk mempertahankan penyajian klasifikasi neto sebagaimana yang sudah diatur dalam PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba kedalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu (a) aset neto terikat permanen, (b) aset neto terikat temporer dan (c) aset neto tidak terikat. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tidak membatasi entitas untuk menyajikan klasifikasi aset neto tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dalam ISAK 35.

2.8 Sumber Keuangan Gereja

Keuangan Gereja adalah uang dan harta benda yang terdapat di gereja yang berasal dari kolekte, amplop persembahan, sumbangan dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan peraturan Gereja yang berlaku, dimana tanggungjawab pengelolaannya berada langsung dan personal kepada Dewan Keuangan setiap gereja paroki/stasi. Harta benda gereja diperoleh melalui pembelian, penghasilan, kolekte, amplop persembahan, derma, pemberian dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip kristiani (Liu, 2018). Tanggung jawab dalam hal pengelolaan harta benda gereja berada ditangan Dewan Pastoral Stasi/Paroki setiap gereja katolik yang ada dibawah naungan Keuskupan Agung Medan. Dalam mengumpulkan dana, mengelola dan menyalurkannya pun harus dengan cara yang baik dan benar.

2.9 Peneliti Terdahulu

Table 2.4 Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rosariana, M. (2018)	Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Berdasarkan PSAK 45 (Studi Kasus pada Gereja Katolik St.Hubertus Kertosono)	Laporan Keuangan yang disusun oleh Gereja katolik St.Hubertus Kertosono belum sesuai dengan PSAK 45 karena hanya menyusun catatan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk buku kas.
Leiwakabessy, P. (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Organisasi Nirlaba Entitas Gereja Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 (Studi Kasus Gereja Masehi Injili di Minahasa Baitel Kolongan)	Kegiatan akuntansi yang ada pada GMIM Baitel Kolongan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam hal pelaporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK No.45 karena, GMIM Baitel Kolongan mempunyai landasan sendiri yaitu mengikuti format laporan keuangan dari Badan Pengawas Majelis Sinode (BPMS).
Koe, K. (2017)	Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Menurut PSAK 45 pada Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Tamalanrea	Menunjukkan bahwa PSAK No.45 belum diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan di Gereja Toraja Jemaat Tamalanrea Klasis Makassar.
Liu, A. (2018)	Evaluasi Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus di Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru Kupang)	Paroki Santa Maria Assumpta Kupang belum menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan menurut PSAK 45 Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba seperti paroki seharusnya menyajikan 4 (empat) laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan,

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		laporan aktivitas, laporan kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada praktiknya Paroki Santa Maria Assumpta Kupang hanya menyajikan laporan kas harian dan laporan keuangan bulanan.
Buchori, A. (2017)	Implementasi PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang Surabaya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang Surabaya belum menerapkan PSAK No.45 dalam pelaporan keuangannya. Laporan keuangan hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas bulanan. Panti Asuhan belum menghitung penyusutan aset tetap yang dimiliki. Panti Asuhan belum membuat kebijakan akuntansi yang relevan. Panti Asuhan belum mengelompokkan aset neto berdasarkan pembatasan aset neto. Penyaluran sumber daya yang dikelola oleh panti asuhan kurang sesuai dengan golongan yang berhak menerima sumber daya tersebut.

Penelitian terdahulu yang dibuat oleh Rosariana yaitu membahas tentang rekonstruksi penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45, dimana penelitian ini dilakukan pada organisasi nonlaba yaitu tempat peribadatan (studi kasus pada gereja St. Hubertus Kertosono). Persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah standar akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan

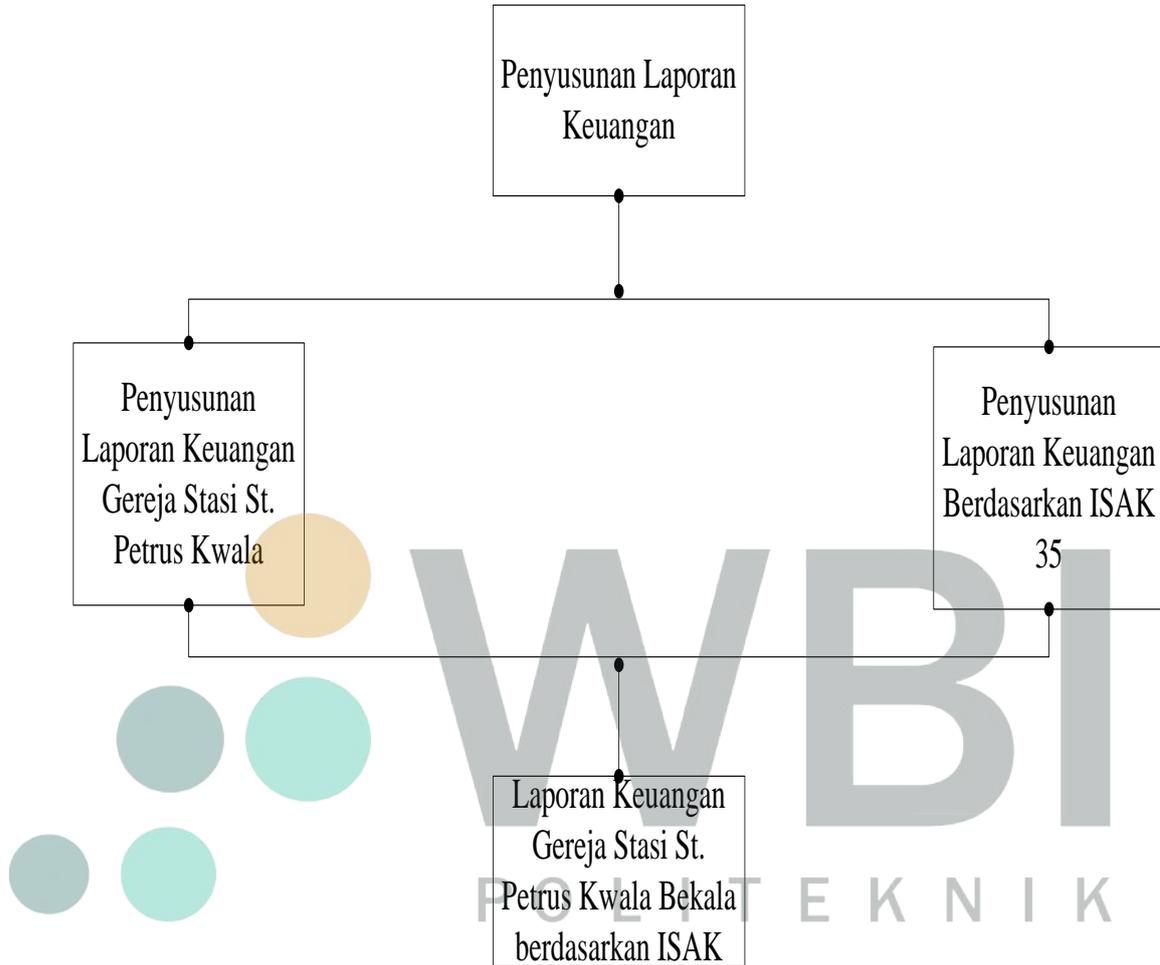
akan dilakukan pada organisasi nonlaba kategori tempat peribadatan juga yaitu gereja katolik St. Petrus Kwala Bekala Medan. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat di perlakuan standar akuntansi, bahwa Rosariana menerapkan PSAK 45, sedangkan penulis terhadap perubahan peraturan DSAK IAI 2019 yaitu ISAK 35.

Penelitian yang dibuat oleh Leiwikabessy yang membahas tentang analisis penerapan akuntansi organisasi nirlaba entitas gereja oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Persamaan penulis dengan Leiwikabessy yaitu sama-sama menggunakan gereja sebagai tempat objek penelitian, dalam kegiatan akuntansinya sudah berjalan dengan baik, namun pelaporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 45. Perbedaan penelitian tersebut standar akuntansi yang diterapkan PSAK 45, sedangkan penulis ISAK 35 serta dalam penelitian tersebut penelitian Leiwikabessy berfokus pada gereja Kristen sedangkan penulis berfokus terhadap gereja Katolik.

Penelitian yang dilakukan oleh Koe yaitu membahas tentang evaluasi penyusunan laporan keuangan pada Gereja Toraja Klasis Makassar. Persamaan terhadap penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu tempat peribadatan atau gereja dan mempunyai laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar PSAK No.45 yaitu hanya sebatas kas masuk dan kas keluar. Perbedaan dari penelitian Koe dengan penulis yaitu penelitian yang berfokus dilakukan pada Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Tamalanrea, sedangkan penulis Gereja Katolik St. Petrus Kwala Bekala Medan.

2.10 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir